BAB III

PETA POLITIK DALAM PEMILUKDA 2003-2013

A. PETA CALON DAN PARTAI PENDUKUNG 2003-2008

1. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2003

Pada tahun 2002 DPRD Kabupaten Bangkalan, harus memperoses pemilihan Bupati baru, menyusul jabatan Bupati Bangkalan H.M. Fattah akan berakhir tanggal 2 Februari 2003. Komposisi DPRD periode 1999 sampai 2004 terdiri dari 4 Fraksi yakni: Fraksi Kebangkitan Bangsa dengan jumlah 25 anggota, Fraksi PDI P terdiri dari 7 anggota, Fraksi TNI dan POLRI 5 anggota dan Fraksi Persatuan Amanat Ummat beranggotan 8 orang.

Semasa otonomi daerah belum diimplemenatasikan, dan pemilihan kepala daerah masih mengacu pada undang-undang No.22 tahun 1999 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah yang masih bersifat sentralistis, meskipun DPRD berwenang memilih kepala daerah, namun dalam kenyataannya campur tangan pusat masih sangat dominan. Pada waktu itu hampir dapat dipastikan bahwa hanya calon yang direstui oleh pemerintah pusat yang lebih cenderung berpeluang sehingga muncul istilah calon pendamping yang dipasang agar proses pemilihan tampak demokratis.[1]

Namun ketika otonomi daerah efektif berlaku kondisi tersebut berubah, dan peran pemerintah pusat tidak lagi dominan, mengingat kewenangan pemilihan

[1] Aliman Harish, et al, *RA Fuad dan Civil Society* (Bangkalan: Leksdam,2004), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

daerah sudah diserahkan kepada daerah. Akibatnya dinamika politik yang terjadi di daerah sepenuhnya berada di tangan rakyat setempat dimana mekanisme sepenuhnya dilaksanakan oleh DPRD.

Dengan aturan main seperti itu, partai-partai politik di Kabupaten Bangkalan lalu mulai melaksanakan penjaringan para bakal calon Bupati dan wakil Bupati Bangkalan periode 2003-2008 untuk kemudian disalurkan melalui fraksi-fraksi di DPRD.[2] Pada waktu itu, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melakukan penyeleksian untuk para kader partainya yang kelak akan dicalonkan Bupati dan wakil Bupati dari tingkat anak cabang hingga cabang. Semula ada 3 nama ulama' NU di lingkungan PKB yang mencuat yakni; ketua DPRD Kabupaten Bangkalan Drs. HM. Syafik Rofi'i, KH. Imam Bukhori (Ra Imam) dan RKH. Fuad Amin Imron (Ra Fuad).

Sementara itu pencalonan RKH. Fuad Amin Imron bukannya tanpa kontroversi. Sebagian kalangan di Kabupaten Bangkalan mulanya memandang bahwa pencalonan figur Kiai Fuad amin Imron (Ra Fuad) kurang tepat karena anggapan meraka seorang kiai sebaiknya menempati fungsi ke-kiai-annya tanpa harus menjadi Bupati. Sebab jika hal itu gagal tentunya akan berpengaruh negatif terhadap reputasi para kiai secara keseluruhan. Kalangan ini berpendapat setiap figur punya tugas dan tempat masing-masing. *Lakonah lakoneh*, *kennengngennah kennengeh* (pekerjaannya kerjakan, tempatnya tempati). Meski demikian, kalangan ini tidak bermaksud menghalang-halangi pencalonan Ra Fuad, karena yang ingin

[2] Ibid., 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditegaskan ialah kiai bisa menjadi bupati asal didukung dengan kemampuan yang memadai.

Sementara kalangan lain berpendapat tidak masalah seorang kiai menjadi bupati karena justru dapat menjadi panutan moral. Kaitannya dengan kemampuan dapat didukung oleh staf ahli sehingga tidak perlu dirisaukan. Kalangan ini berpendapat bahwa menjadi pengurus NU dipandang jauh lebih berat dari pada menjadi bupati. Meskipun kedua pandangan tersebut berinteraksi, namun tidak membuat proses penjaringan calon di PKB terganggu. Justru kedua pandangan tersebut membuat seleksi calon bupati di internal PKB dilakukan secara ketat sehingga mutu calon Bupati di internal PKB lebih dapat dipertanggungjawabkan.

Pada waktu itu figur calon mengerucut pada diri Ra Fuad. Dari sejumlah pengurus anak cabang (PAC) Partai Kebangkitan Bangsa di Kabupaten Bangkalan, 15 PAC memilih Ra Fuad dan sisanya terbagi kepada lainnya. Hal itu tak lepas dari dukungan KH. Abdullah Sachal sebagai tokoh sepuh kiai di Kabupaten Bangkalan, sehingga KH. Syafik Rofi'i dan KH Imam Bukhori pun mendukung pencalonan Ra Fuad. Termasuk juga dukungan dari Jaringan Kiai Kampung (JAKIPUNG). Mengingat masyarakat masih menganggap kiai sebagai patron dalam konteks kehidupan bermasyarakat menurut Aliman Harish.[3]

Sementara itu tahap-tahap pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Bangkalan pada waktu itu diwarnai dinamika politik yang memuncak dengan aksi berbagai demonstrasi. Unjuk rasa itu dipicu keputusan DPRD Bangkalan yang

[3] Aliman Haris, *Wawancara*, Bangkalan, 1 Desember 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menolak laporan pertanggung jawaban (LPJ) akhir masa jabatan Bupati HM. Fatah dimana rencananya akan kembali dicalonkan oleh pendukung sebagai bupati Bangkalan untuk periode yang kedua kalinya.

Penolakan tersebut mengakibatkan tertutupnya peluang HM. Fatah untuk mencalonkan kembali menjadi bupati bangkalan periode yang kedua (sesuai dengan persyaratan administratif yang telah ditetapkan panitia pemilihan bupati dan wakil bupati) sehingga para pendukungnya kemudian berunjuk rasa menentang keputusan itu dan menuntut proses pemilihan bupati dihentikan. Namun aksi itu ditandingi oleh demonstran lain yang mendukung keputusan DPRD Kabupaten Bangkalan yang menginginkan proses pemilihan bupati dan wakil bupati tetap berlangsung. Pihak demonstran ini umumnya merupakan pendukung Kiai Fuad Amin Imron (Ra Fuad), calon kuat yang memang didukung massa secara riil.

Demonstrasi diantara kedua belah pihak datang silih berganti mewarnai proses pemilihan kepada daerah Kabupaten Bangkalan. Data sekretariat DPRD Bangkalan menunjukan bahwa pada tahun 2001 unjuk rasa di gedung dewan hanya terjadi 2 kali, namun jumlah masa demonstrasi itu meningkat tajam pada tahun 2002 menjadi 29 kali. Dari jmulah tersebut sebagian besar merupakan demonstrasi dalam menyampaikan aspirasi tentang pemilihan bupati dan wakil bupati.

Pada tanggal 18 Desember 2002, DPRD Kabupaten Bangkalan menyelenggarakan sidang paripurna guna menetapkan nama-nama calon bupati

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan wakil bupati. Dalam sidang tersebut tercatat 3 fraksi masing-masing fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), fraksi Persatuan Amanat Ummat (PAU) dan fraksi TNI/Polri tidak mengajukan. Fraksi Partai Kebangitan Bangsa dan Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) mengajukan nama calon Bupati RKH. Fuad Amin Imron dan Wakil Bupati Ir. H. Muhammadong. Sedangkan fraksi Persatuan Amanat Ummat mengajukan pasangan calon Bupati Ir. H Sulaiman dan wakil Bupati H. Sunarto.

Tabel 6

Anggota DPRD Hasil Pemilu Per-Fraksi Tahun 1982-1999

No.	Hasil Pemilu	ABRI	PPP	Golkar	PDI-P	PAU	PKB	Jumlah
1	Tahun 1982	6	22	12	-	-	-	40
2	Tahun 1987	9	17	18	1	-	-	45
3	Tahun 1992	9	13	22	1	-	-	45
4	Tahun 1997	9	15	21	-		-	45
5	Tahun 1999	5	-	3	7	5	25	45
6	Tahun 2003	5	-	-	7	8	25	45

Sumber data: sekretariat DPRD Kabupaten Bangkalan.

Pemilihannya sendiri dilangsungkan dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Bangkalan di gedung dewan pada tanggal 6 Januari 2003 dalam penjagaan ektra ketat dari aparat keamanan menyusul maraknya masyarakat yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berunjuk rasa di luar gedung DPRD. Sementara di dalam gedung jalannya pemilihan cukup dramatis saat para anggota dewan menggunakan hak pilihnya. Ketika penghitungan suara dilakukan hasilnya cukup fenomenal. Pasangan RKH. Fuad Amin Imron dan Ir. Muhammadong berhasil meraih kemenangan dengan perolehan 42 suara mengungguli rivalnya pasangan Ir. H. Sulaiman dan H. Sunarto yang hanya didukung oleh 3 suara.

2. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2008

Keluarnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka pencalonan pasangan calon kepala daerah dapat melalui tiga jalur, yaitu partai atau gabungan partai yang memperoleh kursi di DPRD, gabungan partai yang tidak memperoleh kursi di DPRD, dan calon perseorangan yang ikut pilkada.[4]

Atas landasan undang-undang itulah RKH. Fuad Amin Imron (RA Fuad) kembali mencalonkan diri sebagai bupati pada Tahun 2008, akan tetapi Ra Fuad kali ini memilih berpisah dengan Ir. Muhammadong yang pernah menjadi wakilnya selama satu periode. Tahun 2008 menjadi pemilu yang secara terbuka dipilih oleh rakyat. Ada 5 pasang calon yang mendaftar kepada KPUD Kabupaten Bangkalan yaitu; 1. dr. H. A. Hamid Nawawi, Sp.A., dan Drs. Hosyan Muhammad, SH. yang diusung oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP), 2. Ir. H. Muhammadong dan H. Abdul Rozak, SH. yang diusung oleh PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Demokrat, 3. RKH. Fuad Amin Imron dan Drs. KH. M. Syafik

[4]https://www.sjdih.depkeu.go.id/fulltext/2008/12tahun2008uu.htm (18 Januari 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rofi'i diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), 4. KH. Imam Bukhori (Ra Imam) dan H. Soleh Farhat dan yang terakhir, 5. KH. Nurruddin dan H. Bai Arifin. Dari lima pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bangkalan pada akhirnya hanya menetapkan 3 pasang calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan yaitu: 1. pasangan dr. H.A Hamid Nawawi. Sp.A., dan Drs. Hosyan Muhammad, SH. yang diusung oleh Partai Persatuan Pembangunan, 2. pasangan Ir. H. Muhmmadong dan H. Abdul Rozak. SH. yang diusung oleh PDI Perjuangan dan 3. pasangan Partai Demokrat dan RKH. Fuad Amin Imron dan Drs. KH. M. Syafik Rofi'I yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Sementara untuk 2 pasangan lainnya, KPUD Bangkalan tidak bisa meloloskan dikarenakan persyaratan partai yang tidak lengkap secara administrasi, tutur Fauzan Djakfar selaku ketua KPUD Bangkalan.[5]

Fauzan Djakfar menambahkan bahwa pada pemilu tahun 2008 dinamika yang berkembang memang tidak terjadi konflik yang bermuara pada kerusuhan, sebab proses pemilihan berjalan dengan aman dan tentram. Hal itu menjadi kondisi yang bagus karena sistem dan merujuk kepada kata kiai. Berikut jumlah daftar pemilih tetap (DPT) kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bangkalan.

[5] Fauzan Djakfar, *Wawancara*, Bangkalan 2 Desember 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tablel 7

Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Bangkalan 2008

No.	NAMA KECAMATAN	PEMILIH TERDAFTAR			JUMLAH TPS	Ket
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah		
1	BANGKALAN	25.903	28.345	54.248	104	
2	SOCAH	17.171	19.656	36.827	72	
3	BURNEH	21.536	22.52	44.056	88	
4	KAMAL	15.942	17.578	33.51	65	
5	AROSBAYA	14.516	15.747	30.263	66	
6	KLAMPIS	18.094	20.979	39.073	80	
7	GEGER	20.58	24.129	44.709	86	
8	SEPULUH	13.539	15.624	29.163	60	
9	KOKOP	19.634	21.202	40.836	76	
10	TANJUNG BUMI	16.264	17,564	33.828	64	
11	KWAYAR	15.112	17.014	32.126	72	
12	LABANG	10.943	12.558	23.501	49	
13	TRAGAH	9.12	10.831	19.951	42	
14	TANAHMERAH	23.135	25.24	48.375	97	
15	BLEGA	20.136	21.495	41.651	85	
16	KONANG	15.051	16.422	31.473	60	
17	MODUNG	15.845	18.233	34.078	64	
18	GALIS	26.979	29.375	56.354	111	
	JUMLAH	319.51	354.512	674.022	1,341	

Sumber data: Humas KPUD Bangkalan 2 Desember 2015.

3. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2013

Peran Bani Kholil dalam menentukan arah politik di Bangkalan masih sangat dominan, terbukti pada pemilihan kepala daerah tahun 2013, pengaruh RKH. Fuad Amin Imron masih sangat kuat. Namun ketika RKH. Fuad Amin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imron tidak bisa mencalonkan sebagai bupati lagi karena bertentangan dengan UU no. 24 tahun 2014. Maka Ra Fuad memutusakan untuk mencalonkan putranya yang bernama Makmun ibnu Fuad (Ra Momon) sebagai calon bupati. Akan tetapi penunjukan Ra Momon sebagai calon bupati ternyata mendapatkan penolakan dari pihak keluarga sendiri, salah satunya penolakan dari sepupunya sendiri yaitu Kiai Imam Bukhori (Ra Imam) yang tak lain adalah keponakan dari RKH. Fuad Amin Imron (Ra Fuad), sehingga Ra Imam mencalonkan diri sebagai kepala daerah pada tahun 2013. Sebab Ra Imam tidak terlalu sejalan dengan Ra Fuad sewaktu memimpin Kota Bangkalan selama 2 Periode. Ra Imam menilai Ra Fuad tidak memiliki komitmen terhadap amanah rakyat dan dalam hal kebijakan politik. Oleh karena hal itulah Ra Imam memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai bupati.[6] Dengan demikian kontestasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati akhirnya didominasi oleh Trah/Bani Kholil.

Sementara itu Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bangkalan menerima 3 pasang calon bupati dan wakil bupati yang mendaftar, yaitu pertama pasangan KH. Imam Bukhori dan Zainal Alim yang diusung oleh partai PKNU dan PPN, kedua pasangan Nizar Zahro dan Zulkifli yang diusung partai PNBK dan PBR dan pasangan terakhir Makmun Ibnu Fuad dan Mundir Rofi'i yang diusung oleh Partai Gerindra, PAN, PKB, PDIP, PPP, Partai Demokrat dan Partai Hanura.

[6] Imam Bukhori, *Wawancara*, Bangkalan, 05 Desember 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun pasangan calon nomor urut satu, yakni KH. Imam Bukhori dan HR. Zainal Alim kandas di tengah perjalanan hanya 6 (enam) hari menjelang pemilu, ketua KPUD Kabupaten Bangkalan telah mencoretnya sebagai salah satu calon dengan berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya Nomor 136/G/2012/PTUN.Sby, tanggal 5 Desember 2013, sehingga tidak dapat mengikuti tahap pemilihan umum dalam Pemilukada Kabupaten Bangkalan.[7] Pencoretan pasangan calon nomor urut satu tersebut disebabkan ada konflik internal dua kepengurusan partai yakni PPD dan PPN.

Hal itu berawal dari internal kepengurusan partai yang mengusungnya yakni Partai Persatuan Daerah (PPD) yang berganti nama menjadi Partai Persatuan Nasional (PPN), antara pengurus lama dengan pengurus baru (ketua dan sekretaris) H.M. Mukhlis Alkomi, S. Pd. sebagai ketua dan Ahmad Rois sebagai sekretaris dari Partai Persatuan Daerah kepengurusan yang lama, sedangkan dari pengurus baru Supardi sebagai ketua dan Husnan sebagai sekretaris dari Partai Persatuan Nasional, kedua pengurus partai tersebut saling mengaku menjadi pengurus dan saling menunjukkan SK. Akhirnya H.M. Mukhlis Alkomi S. Pd. dan Ahmad Rois merasa dirinya dirugikan karena mereka tidak merasa mengusung calon K.H Imam Bukhori dan HR. Zainal Alim sehingga berujung pada mengajukan gugatan ke PTUN Surabaya, dan PTUN memenangkan mereka.

[7] Fauzan Djakfar, *Wawancara*, Bangkalan, 08 Desember 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Atas dasar putusan PTUN Surabaya, maka KPU Bangkalan akhirnya mendiskualifikasi pasangan Cabup-Cawabup nomor urut satu yakni pasangan K.H Imam Bukhori dan Zainal Alim. Didiskualifikasinya pasangan Cabup Cawabup nomor urut satu K.H Imam Bukhori dan Zainal Alim membuat gejolak di kalangan bawah terutama kalangan santri dan kaum "*blater"*. Gejolak santri dan kaum *blater* tersebut sampai pada pendudukan gedung KPUD Bangkalan selama hampir satu minggu. Konsekuensi dari keputusan KPUD tersebut otomatis pilkada Kabupaten Bangkalan hanya diikuti 2 pasangan calon. Setelah melalui proses pencoblosan ditetapkanlah pasangan calon Makmun Ibnu Fuad (Ra Momon) dan Ra Mundir Rofi'i, sebagai pemenang pilkada dengan perolehan suara yang diklaim tertinggi se-Indonesia, yakni unggul jauh dari rivalnya Nizar Zahro dan Zulkifli, dengan kemenangan sebesar 93,47%.

B. GENEALOGI TRAH KIAI DAN NON TRAH KIAI

1. Genealogi Trah Kiai

Latar belakang para kiai di Kabupaten Bangkalan terlibat dalam kehidupan politik lebih bersifat historis/genealogis intelektual dan kultural. Secara historis geneologis keterlibatan mereka dalam dunia politik karena berkiblat kepada para pendahulu mereka dalam visi dan pandangan politiknya. Di samping itu, para kiai yang terlibat dalam dunia politik merasa berkewajiban untuk meneruskan langkah dan sepak terjang para pendahulunya, yang mereka yakini sebagai suatu bentuk pengabdian mereka kepada para pendahulu mereka (ayah dan kakek) dan atau guru mereka. Berangkat dari hal di atas, maka tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengherankan jika suatu kelompok politik keagamaan di Kabupaten Bangkalan dirintis dan dipimpin oleh para kiai yang masih mempunyai keturunan yang sama atau dengan kata lain para elit organisasi keagamaaan di Kabupaten Bangkalan terdiri dari orang-orang yang masih memiliki hubungan kekeluargaan dan kekerabatan.

Keterlibatan para kiai dalam bidang politik diperkuat dengan data historis yang menggambarkan bahwa pada umumnya kiai-kiai telah berkecimpung dalam politik, sejak masih bercokolnya penjajahan di Kabupaten Bangkalan. Peran ini dilanjutkan pada masa orde lama-dengan keterlibatan mereka dalam melawan PKI di Bangkalan. Pada masa Orde Baru mereka terlibat dalam politik dengan menjadikan Partai Persatuan Pembangunan sebagai satu satunya wadah aspirasi dan perjuangan politik mereka. Kejatuhan rejim Orde Baru dan berhembusnya angin reformasi melahirkan fenomena baru, yaitu munculnya kebebasan berkumpul dan berserikat. Iklim ini memberikan peluang kepada seluruh kekuatan politik bangsa untuk mendirikan partai-partai politik.

Menanggapi keadaan seperti ini, maka para kiai di Kabupaten Bangkalan menggunakan kesempatan yang ada untuk mengaktifkan diri dalam partai politik yang sesuai dengan visi dan aspirasinya. Kelompok kiai yang tergabung dalam organisasi Nahdlatul Ulama umumnya memilih Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai wadah perjuangannya, sementara kelompok kiai yang tergabung dalam organisasi Sarekat Islam (SI) memilih tetap aktif dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sebagai organisasi yang masanya kebanyakan adalah kaum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

santri baik PPP maupun PKB mempunyai ciri dan karakteristik kepemimpinan yang hampir sama.

Di kedua partai politik ini kiai berperan sebagai tokoh sentral dan memiliki peran yang sangat menentukan dalam pengambilan keputusan-keputusan partai. Secara kultural keterlibatan kiai-kiai di Kabupaten Bangkalan dalam bidang politik juga disebabkan tatanan budaya masyarakat Bangkalan, yang menempatkan kiai sebagai sosok pemimpin masyarakat dengan berbagai kelebihan yang dimilikinya. Kiai merupakan figur yang harus dihormati dan ditaati bahkan sering dikultuskan. Fakta ini mengakibatkan kepemimpinan kiai tidak terbatas pada lingkup wilayah keagamaan, namun juga merambah hingga ke seluruh kehidupan termasuk dalam bidang politik

Pasca reformasi yang terjadi pada tahun 1998, kiai secara turun temurun selalu mendapat tempat ruang-ruang sosial dan politik, bahkan tak jarang para kiai menduduki jabatan yang strategis di tataan pemerintah. Dari sekian banyak trah kiai di Kabupaten Bangkalan, Bani Kholil atau keturunan Syaikhona Kholil yang selalu paling dominan.

Seperti diketahui, RA Fuad adalah cicit Mbah Kholil Bangkalan, kiai besar yang pernah dimiliki Madura. Mbah Kholil atau Kiai Kholil adalah guru para pendiri Nahdlatul Ulama (NU), seperti KH. Muhammad Hasyim Asy'ari, KH. Abdul Wahab Hasbullah, RKH. As'ad Syamsul Arifin, KH. Bisri Syamsuri dan lainnya. Kakek buyut RKH. Fuad Amin Imron adalah Raden Ayu Arbi'ah, yang juga merupakan keturunan keluarga bangsawan di Bangkalan pada masa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu. Sementara itu, ayah RA Fuad yakni KH. Amin Imron adalah sosok kiai, sekaligus politikus. Ayahnya merupakan salah satu tokoh sentral PPP, tidak hanya di Kabupaten Bangkalan, tapi tingkat nasional.[8]

RKH. Fuad Amin Imron (Ra Fuad) di bidang politik diawali dengan menjadi Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Bangkalan (1996-1998). Di era reformasi, RA Fuad lompat ke PKB dan ditunjuk menjadi wakil ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Timur (1998-2000). Pada tahun 2007, dia juga terpilih menjadi Ketua Dewan Syuro DPW PKB Jawa Timur. Aktifitasnya di PKB telah mengantarkan dirinya menjadi anggota DPR RI 1999-2004.

RA Fuad sendiri dipanggil kiai oleh masyarakat Kabupaten Bangkalan. Trah atau garis keturunan yang dianggap mulia ini menjadi salah satu faktor utama yang memuluskan langkahnya menjadi Bupati Bangkalan hingga dua periode berturut-turut (2003-2013).

Sejak era pilkada langsung, beberapa calon Bupati di Kabupaten Bangkalan adalah dari keluarga besar Fuad sendiri, seperti anak, sepupu atau keponakannya. Akhirnya pada pilkada tahun 2013, anak ketiga beliau yang bernama Makmun Ibnu Fuad, yang terpilih menggantikan dirinya. Makmun memecahkan rekor MURI sebagai bupati termuda pada usia 26 tahun.

[8]Harist, *RA Fuad dan Civil Society*, 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Genealogi Non Trah Kiai

Peran kiai dalam bidang politik di Kabupaten Bangkalan memang dominan, namun demokrasi di Kabupaten Bangkalan tak lantas menjadi arena kaum santri saja (trah kiai). Berbagai kalangan muncul baik dari elemen masyarakat biasa, kaum *blater* hingga akademisi. Meskipun, memang masih dirasa sulit untuk bersaing di tataran elit politik Kabupaten Bangkalan.

Kemunculan para tokoh di luar kategori non trah ini tak lain disebabkan oleh arus globalisasi dan pembangunan di pulau Madura, pasca diresmikannya jembatan suramadu, akses para anak petani untuk mengenyam pendidikan di kota-kota besar seperti Surabaya, Malang bahkan Yogyakarta terbuka luas. sehingga hal ini membuat pola pikir masyarakat di Kabupaten Bangkalan berubah sedikit demi sedikit, sampai muncullah tokoh-tokoh dari kalangan akademisi seperti Mathur Huzairi, ketua DPC Partai Bulan Bintang. Aliman Haris, mantan anggota DPRD Kabupaten Bangkalan periode 2004-2009, yang sama-sama mengenyam pendidikan strata satu di kota Surabaya. Tak hanya pemuda yang menempuh pendidikan di luar Kabupaten Bangkalan, ada juga tokoh yang lahir dari Almamater Universitas Bangkalan (UNIBANG) yang saat ini berubah menjadi Universitas Trunojoyo Madura (UTM). seperti Hosyen, yang sempat maju dalam kontestasi pemilihan Wakil Bupati pada tahun 2008, saat ini menduduki kursi DPRD Kabupaten Bangkalan sebagai ketua komisi D.[9]

[9] Matur Huzairi, *Wawancara*, Bangkalan, 20 Desember 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Elemen-elemen dari golongan non trah kiai, memang muncul di era pasca reformasi seiring dengan mulai meratanya pendidikan umum di Kabupaten Bangkalan. Para aktor politik dari kalangan akademisi sedikit demi sedikit mulai muncul dan berada di pos-pos penting pemerintahan Kabupaten Bangkalan.

C. PETA HASIL PEMILUKADA 2003 DAN 2008

1. Peta Hasil Pilkada 2003

Pada tanggal 18 Desember 2002, DPRD Kabupaten Bangkalan menyelenggarakan sidang paripurna guna menetapkan nama-nama calon bupati dan wakil bupati. Dalam sidang tersebut tercatat 3 fraksi masing-masing fraksi Kebangkitan Bangsa, fraksi Persatuan dan Amanat Ummat dan fraksi TNI/Polri tidak mengajukan. Fraksi Kebangkitan Bangsa dan Fraksi PDI Perjuangan mengajukan nama calon Bupati RKH. Fuad Amin Imron dan Wakil Bupati Ir. H. Muhammadong. Sedangkan fraksi Persatuan Amanat Ummat (PAU) mengajukan pasangan calon Bupati Ir. H. Sulaiman dan Wakil Bupati H. Sunarto.

Pemilihan yang diadakan pada tanggal 6 Januari 2003 dalam penjagaan ektra ketat dari aparat keamanan menyusul maraknya masyarakat yang berunjuk rasa di luar gedung DPRD. Sementara di dalam gedung jalannya pemilihan cukup dramatis saat para anggota dewan menggunakan hak pilihnya. Ketika penghitungan suara dilakukan hasilnya cukup fenomenal. Pasangan RKH. Fuad Amin Imron dan Ir. Muhammadong berhasil meraih kemenangan dengan perolehan 42 suara mengungguli rivalnya pasangan Ir. H. Sulaiman dan H. Sunarto yang hanya didukung oleh 3 suara. Hasil tersebut mengantarkan RA Fuad

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi bupati untuk periode pertama dan di dampingi oleh Muhammadong sebagai wakil Bupati.

Adapun detail perolehan suara pada pilkada tahun 2003 sebagaimana yang tertera dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 8

Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pilkada 2003

NO	NAMA PARTAI	NAMA PASLON	PEROLEHAN SUARA
1	F. PKB F. PDIP	1. Rkh. Fuad Amin Imron 2. Ir. Muhammadong	42 suara DPRD
2	F. PAU	1. Ir. H. Sulaiman 2. H. Sunarto	3 suara DPRD

Sumber data : Sekretariat DPRD Bangkalan

2. Peta Hasil Pemilih Kepala Daerah (Pilkada) 2008

Pada pemilihan umum bupati dan wakil bupati tahun 2008 ada 3 pasang calon yang mendaftar kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Bangkalan yaitu; 1. pasangan dr. H.A Hamid Nawawi. Sp.A dan Drs. Hosyan Muhammad, SH. yang diusung oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP), 2. pasangan Ir. H. Muhammadong dan H. Abdul Rozak, SH. yang diusung oleh partai PDI Perjuangan dan Partai Demokrat, 3. pasangan RKH. Fuad Amin Imron dan Drs. KH. M. Syafik Rofi'i yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Pada periode pilkada tahun 2008 RA Fuad keluar sebagai pemenang pada kontentasi pemilihan Bupati, dengan perolehan suara 373.422, unggul dari dua pasang calon lainnya, yakni pasangan yang pertama dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perolehan suara 17.204, sedangkan pasangan nomor urut ke-dua dengan hasil suara 71.584. Adapun detail perolehan suara pilkada pada tahun 2008 sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 9
Rekapitusi Hasil Pemungutan Suara 2008

NO. URUT	NAMA KECAMATAN	PEMILIH TERDAFTAR			JUMLAH TPS	PEROLEHAN SUARA			SUARA TIDAK SAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH		1	2	3	
1	Bangkalan	25.903	28.345	54.248	104	1.668	5.618	27.484	1.392
2	Socah	17.171	19.656	36.827	72	1.217	6.925	15.22	1.03
3	Burneh	21.536	22.52	44.056	88	669	3.97	31.471	857
4	Kamal	15.942	17.578	33.51	65	1.288	5.19	12.393	775
5	Arosbaya	14.516	15.747	30.263	66	595	2.769	16.625	533
6	Klampis	18.094	20.979	39.073	80	2.123	3.039	19.467	765
7	Geger	20.58	24.129	44.709	86	1.146	3.506	19.702	1.204
8	Sepuluh	13.539	15.624	29.163	60	807	4.035	12.719	692
9	Kokop	19.634	21.202	40.836	76	751	3.683	25.242	882
10	T. Bumi	16.264	17,564	33.828	64	570	3.041	21.182	950
11	Kwayar	15.112	17.014	32.126	72	710	4.581	17.211	653
12	Labang	10.943	12.558	23.501	49	740	4.045	10.556	585
13	Tragah	9.12	10.831	19.951	42	442	2.433	12.427	606
14	T. Merah	23.135	25.24	48.375	97	1.043	3.14	30.677	1.013
15	Blega	20.136	21.495	41.651	85	759	6.162	19.711	924
16	Konang	15.051	16.422	31.473	60	436	1.371	23.839	761
17	Modung	15.845	18.233	34.078	64	773	2.783	23.377	863
18	Galis	26.979	29.375	56.354	111	1.467	5.293	34.119	958
	JUMLAH	319.51	354.512	674.022	1,341	17.204	71.584	373.422	15.443

Sumber data: TP dan Humas KPU Kab. Bangkalan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Peta Hasil Pemilih Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2013

Kontestasi pemilihan Bupati dan wakil Bupati didominasi oleh Bani Kholil. Dalam pilkada periode tahun 2013 ini, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Bangkalan menerima 3 pasang calon bupati dan wakil bupati yang mendaftar, yaitu: 1. KH. Imam Bukhori dan Zainal Alim yang diusung oleh PKNU dan PPN, 2. Nizar Zahro dan Zulkifli yang diusung PNBK dan PBR dan ke-3. Makmun Ibnu Fuad (Ra Momon) dan Mundir Rofi'i (Ra Mondir). Dalam pilkada kali ini, pemenangnya adalah pasangan calon nomor urut 3, yakni Makmun Ibnu Fuad dan Mundir Rofi'i. Adapun detail perolehan suara pilkada tahun 2013 sebagaimana yang tertera dalam tabel sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 10

Rekapitusi Hasil Pemungutan Suara 2013

NO URUT	NAMA KECAMATAN	PEMILIH TERDAFTAR			JUMLAH TPS	PEROLEHAN SUARA			SUARA TIDAK SAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH		1	2	3	
1	Bangkalan	29.473	31.611	61.084	169		4.579	26.872	7.506
2	Socah	22.95	24.58	46.875	88		2.809	25.424	3.146
3	Burneh	25.633	26.751	52.384	115		1.833	36.301	2.157
4	Kamal	18.998	20.642	39.64	110		2.832	13.692	3.632
5	Arosbaya	19.826	20.292	40.118	88		2.158	16.309	2.646
6	Geger	29.592	31.817	61.409	115		1.891	27.681	1.42
7	Klampis	23.713	26.371	50.084	113		1.744	23.305	2.194
8	Sepuluh	18.534	20.391	38.925	75		1.785	21.94	1.616
9	T. Bumi	21.447	22.088	43.535	87		925	26.928	1.409
10	Kokop	27.426	28.511	55.937	97		1.574	33.112	1.189
11	Kwayar	21.351	23.083	44.434	103		1.629	27.342	2.89
12	Labang	15.702	17.167	32.869	67		1.451	17.684	2.89
13	T. Merah	33.541	34.502	68.043	129		2.2	49.397	1.98
14	Tragah	13.938	15.191	29.129	62		1.081	21.177	998
15	Blega	27.765	28.587	56.352	125		1.8	37.321	1.483
16	Modung	18.792	21.126	39.919	97		2.045	25.767	1.733
17	Konang	21.572	22.025	43.597	81		1.184	31.834	869
18	Galis	37.454	39.14	76.594	133		2.458	43.9	2.724
	JUMLAH	427.053	453.875	880.928	1.854		53.378	505.986	42.482

Keterangan: pasangan calon nomor urut 1 dinyatakan gugur berdasarkan keputusan PTUN nomor : 136/G/2012/PTUN.surabaya tanggal 5 Desember 2012.[10]

[10] Sumber data: TP dan Humas KPUD Bangkalan 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. DINAMIKA KONFLIK DALAM PEMILUKADA 2003-2013

Selama hampir sepuluh tahun lebih Bani Kholil memimpin pemerintahan Kabupaten Bangkalan, hampir bisa dipastikan bahwa politik dinasti yang mengandalkan keterlibatan trah secara langsung masih sangat kental di Kabupaten Bangkalan. Hal ini terbukti dengan terpilihnya RKH. Fuad Amin Imron (Ra Fuad) sebagai Bupati selama 2 periode. RA Fuad mewarisi trah sang ayah yang juga terjun di dunia politik. Sudah kita ketahui bersama Kiai Amin Imron adalah petinggi Partai Persatuan Pembangunan, dan juga Ra Momon putra dari incumbent (Ra Fuad) terpilih sebagai Bupati Bangkalan periode 2013-2018.

Dinamika politik di Kabupaten Bangkalan pun seperti berkiblat pada satu titik yaitu trah kiai, dimana selain sebagai pemuka agama, kiai di Kabupaten Bangkalan menjadi patron dalam bidang politik yang hampir selama 10 tahun berkuasa di Kabupaten Bangkalan. Konflik dan gesekan yang ada hanya sampai menyentuh level kaum *blater* saja.

Pada pilkada tahun 2003 sikap ke-otoriteran dan demokrasinya Ra Fuad, membuat masyarakat takut dan merasa trauma untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan beliau, sehinnga konflik yang terjadi dikala itu tercekam (tidak terpublikasikan).[11] Sedangkan pilkada tahun 2008, seperti yang diungkapkan oleh ketua KPUD Bangkalan, dinamika yang berkembang memang tidak terjadi konflik yang bermuara

[11] Aliman Haris, *Wawancara*, Bangkalan, 12 Januari 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada kerusuhan, sebab proses pemilihan kepala daerah berjalan dengan aman dan tentram.[12]

Konflik yang paling kentara dalam dinamika politik di Kabupaten Bangkalan, hanya tampak ketika pemilhan kepala daerah (pilkada) pada tahun 2013, hal ini karena calon KH. Imam Bukhori (Ra Imam) yang tak lain adalah keponakan RA Fuad sendiri dicoret oleh KPUD Bangkalan. Konflik inipun hanya terjadi beberapa saat saja, mengingat ketakdziman masyarakat kepada sosok kiai masih sangat dominan.

Selain kiai, dinamika politik di Kabupaten Bangkalan memang diramaikan oleh beberapa kaum akademisi yang bukan trah kiai atau *blater*. Namun mereka yang menjadi pesaing dalam kontestasi politik dan tak punya trah kiai masih terlalu sulit untuk menembus jajaran elit politik di Kabupaten Bangkalan seperti yang diungkapkan oleh Nur Hakim, S.Pd.I selaku sekertaris Partai Bulan Bintang (PBB).[13]

Dominasi trah kiai memang masih belum tergoyahkan selama 10 tahun terakhir. Hal ini tentu menjadikan dinamika politik di Kabupaten Bangkalan tidak benar-benar hidup secara demokratis seperti di kabupaten lain di Madura.

[12] Fauzan Djakfar, *Wawancara*, Bangkalan 2 Deaember 2015.
[13] Nur Hakim, S. Pd.I *Wawancara*, Bangkalan, 17 Desember 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id